



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No.8, Kuningan

Jakarta Selatan 12940, P.O. Box 3489, Telepon/Faksimili 021-5252975

Laman : <http://www.itjen.kemenkumham.go.id>, Surel : itjen@kemenkumham.go.id

Nomor : ITJ.4.UM.01.01-76

20 Februari 2024

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Narasumber Kegiatan Aktif Belajar Kolaboratif di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Periode Bulan Maret Tahun 2024

Yth.

Kepala Pusat Riset Sains Data dan Informasi

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

di Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Aktif Belajar Kolaboratif Periode Bulan Maret Tahun 2024 di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan dilaksanakan secara *offline* pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 13 Maret 2024

Pukul : 09.00 – 11.00 WIB

Tempat : Auditorium Inspektorat Jenderal Lt. 16 Kementerian Hukum dan HAM

Materi : Strategi Peningkatan SPBE melalui Audit Infrastruktur SPBE

Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan agar konfirmasi kesediaan awal menjadi narasumber pada kegiatan dimaksud melalui tautan <https://forms.gle/RYXX168itTAdr6sdA> paling lambat hari Jumat, 1 Maret 2024. Adapun biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya menjadi beban DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2024. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Anjas (087763744968).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapan terimakasih.



a.n. Inspektur Jenderal
Inspektur Wilayah III,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Iwan Santoso
NIP 197004301991031001

Tembusan :

Inspektur Jenderal kementerian Hukum dan HAM



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Kuningan,
Jakarta Selatan 12940, P.O. Box 3489, Telepon/Faksimili 021-5252975
Laman: <http://www.itjen.kemenkumham.go.id>, Surel: itjen@kemenkumham.go.id

NOTULA

Aktif Belajar Kolaboratif Bulan Maret Tahun 2024 Hari-1

dengan tema "Strategi Peningkatan SPBE melalui Audit Infrastruktur SPBE"

Hari/Tanggal	:	Rabu, 13 Maret 2024
Tempat	:	Ruang Auditorium Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM
Pukul	:	09.00 s.d 11.00 WIB
Tema	:	Strategi Peningkatan SPBE melalui Audit Infrastruktur SPBE
Narasumber	:	Andrari Grahitandaru
Peserta	:	<ol style="list-style-type: none">1. Inspektor Wilayah III2. Inspektor Wilayah VI3. Perwakilan Auditor Inspektorat Wilayah I4. Perwakilan Auditor Inspektorat Wilayah II5. Perwakilan Auditor Inspektorat Wilayah III6. Perwakilan Auditor Inspektorat Wilayah IV7. Perwakilan Auditor Inspektorat Wilayah V8. Perwakilan Auditor Inspektorat Wilayah VI

Sesi Pemaparan:

Kegiatan dibuka oleh Bapak Inspektor Wilayah III serta diserahkan kepada moderator yaitu Bapak Nasrudin Nurdiansyah dan diserahkan kepada Ibu Andrari Grahitandaru selaku Narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dalam paparannya Ibu Andrari Grahitandaru menyampaikan materi tentang Strategi Peningkatan SPBE melalui Audit Infrastruktur SPBE, dengan pembahasan sebagai berikut:

1. SPBE membutuhkan 2 (dua) sikap yang paling penting yaitu kolaboratif dan inovatif. Inovatif ditanyakan dalam indikator SPBE nomor 14.
2. SPBE yang baik adalah terlibatnya Inspektorat Jenderal. Peran Inspektorat Jenderal dalam meningkatkan nilai indeks SPBE adalah melalui audit infrastruktur, audit aplikasi, audit keamanan serta reviu atau evaluasi terhadap 47 indikator SPBE. Inspektorat Jenderal seolah menjadi penentu SPBE.
3. Terdapat 47 indikator SPBE antara lain :
 - a. Indikator 1 s.d. 10 berisi tentang kebijakan SPBE Instansi yang berupa dokumen kebijakan;
 - b. Indikator 11 s.d. 20 berisi tentang perencanaan strategis, teknologi dan penyelenggara SPBE yang berupa lampiran kebijakan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat indikator 1 s.d. 20 menjadi 1 (satu) dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2021.

4. Pada indikator 1 terkait kebijakan internal arsitektur SPBE, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendapatkan nilai 2 yang artinya bahwa kebijakan tersebut belum diterapkan oleh seluruh unit kerja. Hal ini dikarenakan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2021 belum mengatur arsitektur SPBE.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2021 perlu direvisi dan disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Selain itu, terdapat 3 (tiga) draft peraturan yang bisa diacu dalam revisi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2021 yaitu standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi, manajemen asset dan manajemen layanan. Setelah ketiga draft peraturan tersebut telah jadi, maka Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia SPBE bisa dilakukan evaluasi kembali dan diperbaiki. Apabila Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2021 sudah diperbaiki, maka efeknya akan banyak ke indikator-indikator lainnya karena kebijakan indikator 1 sampai 28 dijadikan dalam satu peraturan. Selain Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2021, Inspektorat Jenderal juga perlu melakukan reviu terhadap Keputusan Menteri tentang Arsitektur SPBE.
6. Arsitektur SPBE adalah menjadi inti dari perbaikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2021. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Dari keenam domain tersebut, yang dilakukan audit adalah infrastruktur, aplikasi dan keamanan.
7. Setelah keluar Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, arsitektur infrastruktur SPBE terdiri dari platfrom, sistem integrasi dan fasilitas komputasi. Platform terdiri dari komputasi awan dan kerangka infrastruktur dan aplikasi yang sudah tergambar dalam Keputusan Menteri tentang arsitektur SPBE. Sistem Integrasi terdiri dari SPL Pemerintah (SPL Instansi Pusat dan SPL Pemerintah Daerah) dan Jaringan Intra Pemerintah (Jaringan Intra Instansi Pusat dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah). Fasilitas Komputasi terdiri dari Pusat Data Nasional, Pusat Komputasi dan Pusat Kendali. Audit infrastruktur dilakukan terhadap ketiga hal tersebut. Namun, untuk platform dan JIP tidak perlu dilakukan audit karena belum terdapat peraturan yang mengaturnya. Untuk SPLP, mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia dan untuk Pusat Komputasi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Untuk SPLP dan Pusat Komputasi, sudah ada dalam audit tools yang dibuat oleh BRIN.
8. Strategi audit internal infrastruktur adalah tetapkan pusat komputasi yang akan diaudit dan kaitkan dengan SPLP yang akan diaudit karena keduanya saling berhubungan.
9. Infrastruktur SPBE menaungi Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan JIP dan Kebijakan Internal Layanan SPLP beserta lampirannya pada indikator 16 sampai dengan 18.

10. SPLP bertugas untuk berbagi data. Di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sekarang, berbagi datanya secara langsung, belum menjadi satu dalam SPLP. Hal ini menjadi tugas wali data yaitu Pusdatin. Yang harus berbagi data adalah semua unit kerja yang memiliki aplikasi pelayanan publik yaitu 11 Unit Eselon I.
11. Arsitektur SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum dapat mendeskripsikan integrasi proses bisnis karena ID relasi masih kosong.
12. Arsitektur infrastruktur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tergambaran ada 16 Pusat Komputasi. Sedangkan yang tidak memiliki SPLP yaitu 5 buah (Gedung Sekjen, Ditjen HAM Lantai 3 dan 7, Ditjen PAS Lantai 6 dan Gedung JDIH Lantai 1). Untuk JIP, terdapat 22 JIP, namun poin to poin.
13. Salah satu contoh inovasi proses bisnis pada indikator 14 adalah mengarahkan SPLP menjadi satu SPLP.
14. Tujuan SPBE adalah mewujudkan layanan yang terpadu dan terintegrasi.
15. SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagian sudah terintegrasi tetapi belum menggunakan infrastruktur SPLP yaitu penghubung layanan pemerintah. Itulah yang perlu diaudit infrastruktur tersebut.
16. Kementerian PAN-RB tahun 2024 melengkapi SIA Versi 2 yang dapat digunakan oleh Inspektorat Jenderal untuk memantau arsitektur SPBE setiap unit eselon I apakah sudah benar, apakah sudah selesai diinput dan bagaimana relasi-relasinya.
17. Terkait indikator mengenai audit infrastruktur dan audit aplikasi, untuk mendapat nilai 4 perlu dilakukan audit eksternal yang dilaksanakan oleh LATIK. Hanya saja, sampai sekarang LATIK belum ada. Untuk itu, audit eksternal bisa dilaksanakan oleh BRIN. Namun demikian, BRIN memberikan syarat bahwa audit eksternal dapat dilaksanakan apabila nilai SPBEnya sudah mencapai 4,5 ke atas.
18. Untuk indikator 29 audit infrastruktur SPBE, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada pada level 3. Namun demikian, audit TIK internal perlu dilakukan secara rutin.
19. Walidata tingkat pusat yaitu Pusdatin mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
20. Setiap Instansi Pusat hanya memiliki 1 (satu) unit kerja yang melaksanakan tugas Walidata tingkat pusat di masing-masing Instansi Pusat. Untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wali Data belum ditetapkan pada peraturan atau pedoman mengenai manajemen data. Selain itu, produsen data juga belum ditetapkan.

Tanya Jawab:

1. Pertanyaan dari Ibu Sri Yuliani :
 - a. Apakah semua indikator dalam SPBE perlu dilakukan evaluasi?
 - b. Apakah semua aplikasi pelayanan publik perlu dilakukan audit internal?

Jawaban Narasumber:

- a. Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk indikator 32 sampai 47 yang berada pada layanan tidak perlu dilakukan evaluasi karena rata-rata nilainya sudah 5. Yang pasti membutuhkan evaluasi itu adalah indikator 1 sampai dengan 28. Sedangkan untuk indikator 29 sampai dengan 31 berkaitan dengan audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan.
- b. Semua aplikasi pelayanan publik harus dilakukan audit internal. Untuk daftar aplikasinya, dapat dilihat di arsitektur aplikasi. Minimal dilakukan 2 (dua) aplikasi seperti tahun lalu supaya nilainya tetap 3.

2. Pertanyaan dari Bapak Slamet Iman Santoso :

- a. Dari hasil evaluasi Kementerian PAN-RB, terdapat 6 catatan dan rekomendasi. Apakah masih diperlukan evaluasi SPBE oleh Inspektorat Jenderal ?
- b. Apakah integrasi data dan syarat-syaratnya?

Jawaban Narasumber :

- a. Inspektorat Jenderal harus melakukan evaluasi SPBE. Pada level 4, aktivitas tersebut harus direviu atau dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal.
- b. Integrasi data yang dimaksud adalah diharapkan suatu aplikasi tidak berdiri sendiri. Misal ada suatu aplikasi yang memerlukan penginputan data berupa nama dan alamat. Data berupa nama dan alamat merupakan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Sehingga, data berupa nama dan alamat tidak boleh dilakukan penginputan data kembali. Data tersebut harus diintegrasikan dari Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Integrasi data dapat dilihat pada arsitektur aplikasi. Pada arsitektur aplikasi, dapat terlihat data input dan data output. Apabila data output dari aplikasi akan digunakan oleh unit-unit tertentu, maka data output tersebut harus berbagi pakai ke unit-unit tersebut melalui integrasi data. Jadi, integrasi data adalah interoperabilitas.

Kegiatan Aktif Belajar Kolaboratif hari pertama ditutup pada pukul 11.00.

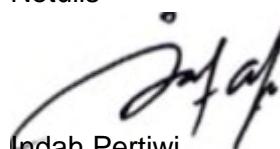
Mengetahui,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Iwan Santoso
NIP 197004301991031001



Notulis


Indah Pertiwi
NIP 199103142020122001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-6 No.8, Kuningan, Jakarta Selatan 12940,
P.O. Box 3489, Telepon/Faksimili: 021-5252975

Laman: <http://www.itjen.kemenkumham.go.id>, Surel:itjen@kemenkumham.go.id

Nomor : ITJ.4.UM.01.01-141 24 April 2024
Sifat : Penting
Hal : Permintaan Narasumber dalam Rangka Pembahasan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE Pendaftaran Perseroan Perseorangan (PPP) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2024

Yth.

1. Kepala Pusat Riset Sains Data dan Informasi Badan Riset Inovasi Nasional;
2. Kelompok Riset Pemerintahan Digital Badan Riset Inovasi Nasional.
di tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Audit Aplikasi Pendaftaran Perseroan Perorangan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024. Sesuai dengan Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor ITJ-KP.04.01-522 tanggal 19 Maret 2024 yang sudah dilaksanakan mulai tanggal 28 Maret 2024 dan mengingat bahwa batas waktu pelaksanaan konfirmasi oleh Auditor sampai dengan 07 Mei 2024, dengan ini kami mohon kesediaan perwakilan dari Badan Riset Inovasi Nasional untuk ditugaskan sebagai narasumber sebanyak 3 (tiga) orang dalam kegiatan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis/ 02 Mei 2024
Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Inspektorat Wilayah III
Inspektorat Wilayah III Lantai 15 Gedung Ditjen Imigrasi - Jl. H. R. Rasuna Said, RT.16/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, Indonesia
Acara : Pendampingan dan Pengarahan dalam rangka Pembahasan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE Pendaftaran Perseroan Perseorangan (PPP) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2024 Tahapan Pelaksanaan Konfirmasi oleh Auditor

Terkait konfirmasi daftar nama narasumber dapat kami terima paling lambat hari Jumat, 26 April 2024 dengan menghubungi Sdri. Cindy Claudia (HP/Whatsapp 081288956552) selaku narahubung untuk kegiatan ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Inspektur Wilayah III,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Iwan Santoso

NIP 197004301991031001

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



NOTULA

PENDAMPINGAN DAN PENGARAHAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN PELAKSANAAN AUDIT APLIKASI SPBE PENDAFTARAN PERSEROAN PERSEORANGAN (PPP) PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM TAHUN 2024 TAHPAN PELAKSANAAN KONFIRMASI OLEH AUDITOR

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Mei 2024
Tempat : Ruang Rapat Inspektorat Wilayah III Inspektorat Jenderal
Pukul : 09.00 WIB s.d 13.00 WIB
Peserta : Tim Auditor Inspektorat Wilayah III Kementerian Hukum dan HAM dan
Narasumber dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)

PEMBUKAAN DAN HASIL DISKUSI

Rapat dibuka oleh Auditor Madya Siti Sofiatun pada pukul 09.00 WIB dengan menjelaskan informasi mengenai Perkembangan Proses Konfirmasi oleh Auditor Atas Pemberian Jawaban Ke - II oleh Auditee Atas Audit Aplikasi Pendaftaran Perseroan Perorangan Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun Anggaran 2024 sesuai surat Nomor ITJ.4.UM.01.01-144 tanggal 25 April 2024 kepada pihak BRIN sebagai pembuka diskusi. Pihak Inspektorat Jenderal dalam hal ini Inspektorat Wilayah III berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 yang bertempat pada Ruang Rapat Inspektorat Wilayah III Inspektorat Jenderal untuk membahas terkait Konfirmasi, Bukti Dukung, serta Penjelasan Kriteria fungsional aplikasi pada Audit Aplikasi Pendaftaran Perseroan Perorangan dari sisi Tata Kelola, Manajemen, dan Fungsionalitas Kinerja yang telah dilakukan oleh Auditor melalui mekanisme panel dengan narasumber Dra. Andrari Grahitandaru M.Sc selaku Perekayasa Ahli Utama, Sopian Amir S.Kom selaku Perekayasa Ahli Pertama, dan Mohammad Fikri, S.Kom selaku Perekayasa Ahli Pertama. Adapun catatan/hasil Pembahasan Hasil Konfirmasi Audit Aplikasi Pendaftaran Perseroan Perorangan Pada Ditjen AHU Tahun Anggaran 2024 tanggal 2 Mei 2024 sebagaimana terlampir.

KESIMPULAN

Apabila terdapat Level pada tiap Indikator yang belum sesuai dengan hasil diskusi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, maka dapat dilakukan beberapa hal, antara lain:

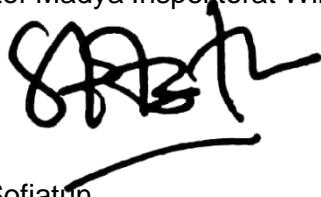
- a. Auditor menyampaikan ke Auditee untuk melakukan upload dokumen/melakukan jawaban kembali pada Audit Tools BRIN supaya Auditor dapat melakukan konfirmasi lanjutan dan menyesuaikan Nilai Level.
- b. Apabila Auditee tidak melakukan jawaban ulang dan Auditor tidak dapat melakukan konfirmasi, maka nilai Level akan tetap namun akan disesuaikan pada Temuan dan Rekomendasi.

PENUTUP

Rapat ditutup oleh Ibu Siti Sofiatun dengan harapan bahwa hal-hal yg telah didiskusikan pada kesempatan ini dapat dilaksanakan dan secara keseluruhan pelaksanaan audit infrastruktur dapat berjalan dengan lancar tepat pukul 13.00 WIB.

Mengetahui,

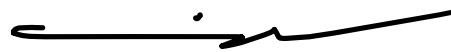
Auditor Madya Inspektorat Wilayah III



Siti Sofiatun
NIP 197812282003122001

Jakarta, 2 Mei 2024

Notulis



Cindy Claudia Sari
NIP 199401052019012001

PEMBAHASAN HASIL KONFIRMASI AUDIT APLIKASI PENDAFTARAN PERSEORANAN PERORANGAN PADA DITJEN

AHU TA 2024

2 Mei 2024

1. Tata Kelola (3 Aktivitas – 6 Pertanyaan)

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfirmasi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfirmasi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan/substansi secara lengkap	
1	David Maradona Lumban Batu	Auditor Muda	Indikator 1	✓	✓	x	x	2	<p>Instansi mengatur Arsitektur Layanan SPBE dilaksanakan, dikelola, dan didefinisikan dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah terdapat Notula Konsiyering Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kemenkumham 2. Telah terdapat Kebijakan internal arsitektur layanan SPBE yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-14.TI.05.01 Tahun 2023 tanggal 19 September 2023 3. Telah terdapat Arsitektur layanan SPBE yang memuat obyek audit PT Perseroan Perseorangan 4. Dokumen belum sesuai dokumen Pelaksanaan layanan SPBE terkait PT Perseroan Perseorangan yang dilakukan sesuai kebijakan. 	Lakukan penyesuaian catatan nomor 4.

		Indikator 2	✓	✓	x	x	2	<p>Instansi mengatur Peta Rencana SPBE dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah terdapat Notula Konsiyering Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Hukum dan HAM 2. Telah terdapat Kebijakan internal peta rencana SPBE yang mengacu pada arsitektur SPBE Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.TI.05.01 Tahun 2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Peta Rencana SPBE belum sesuai, belum memuat obyek audit PT Perseroan Perseorangan di unsur Aplikasi dan unsur Audit TIK 4. Peta Rencana SPBE belum sesuai, belum memuat obyek audit PT Perseroan Perseorangan di unsur Aplikasi dan unsur Audit TIK dan jadwal audit TIK 	Dokumen penerapan atas Peta Rencana SPBE belum seutuhnya sesuai.
		Indikator 3	✓	✓	x	x	3	<p>Instansi melaksanakan evaluasi menyeluruh (audit) terkait sumber daya SPBE (aplikasi dan/atau infrastruktur) Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah terdapat pembahasan pedoman audit teknologi informasi dan komunikasi atas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di 	Sudah sesuai.

									lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 26 Oktober 2023 2. Telah terdapat kebijakan internal audit TIK Instansi melalui Surat Inspektor Jenderal Nomor ITJ.OT.02.01-08 tanggal 13 November 2023 tentang Pedoman Audit Teknologi Informasi and Komunikasi atas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Telah terdapat Surat Inspektor Jenderal Nomor ITJ-PW.03.01-260 tanggal 1 Agustus 2023 perihal Petunjuk Penanganan dan Penertiban Hasil Audit Aplikasi Perseroan Terbatas pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.	
		Indikator 4	✓	✓	x	x	2	Instansi memberikan tugas dan wewenang terkait SPBE di setiap unit kerja (Tim koordinasi SPBE instansi) dilaksanakan, dikelola, dan didefinisikan dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Telah terdapat Surat Nota Dinas Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK.5-HH.04.03-01 tanggal 4 Maret 2022 tentang Permohonan Penyelenggaraan Sidang Komite Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM, namun belum terdapat Surat Undangan / Notulen	Penetapan Level 2 sudah sesuai karena dari Direktorat Perdata sebagai pemilik proses bisnis pendaftaran perseroan perseorangan (PPP) belum masuk sebagai Tim Koordinasi SPBE Instansi karena untuk Direktur Jenderal AHU yang masuk kedalam Tim Koordinasi adalah Direktur Teknologi Informasi saja.	

rapat ya
2. Telah terdapat SK Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-12.05.01 TAHUN 2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Tim Koordinasi SPBE Kemenkumham
dan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.TI.06.02 TAHUN 2021 tanggal 07 April 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Kemenkumham
3.Dokumen belum sesuai, belum menyajikan dokumen unit kerja yang mengoperasionalkan PT Perseroan Perseorangan.

		Indikator 5	✓	✓	x	x	3	<p>kolaborasi instansi dengan stakeholder (internal dan eksternal) termasuk kolaborasi aplikasi SPBE Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah terdapat Surat Undangan rapat yang membahas kebijakan kolaborasi antar aplikasi internal dan eksternal atau penerapan kolaborasi (koordinasi) 2. Telah terdapat kebijakan internal arsitektur aplikasi SPBE melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-14.TI.05.01 Tahun 2023 tanggal 19 September 2023 tentang Arsitektur SPBE Kemenkumham 3. Telah sesuai (diperjelas) 4. Telah sesuai (diperjelas) 	<p>Penetapan Level 3 belum terlihat penjelasannya dalam jawaban konfirmasi. Dalam hal konfirmasi harus dapat menjelaskan bahwa Aplikasi sudah terhubung dengan aplikasi lain dalam hal berbagi pakai data dan sebutkan instansi yang sudah saling taut, sehingga kolaborasi instansi dengan stakeholder (internal dan eksternal) dapat terlihat.</p> <p>Hal tersebut dapat dilihat juga pada Metadata Aplikasi yang dapat dilihat di Arsitektur Aplikasi khususnya aplikasi PPP dan lihat data inputnya yang menyatakan stakeholdersnya siapa begitu juga data outputnya yang menerangkan siapa penggunanya.</p> <p>Berikutnya juga melihat Metadata Layanan dan Arsitektur Data dan Informasi. (Untuk memastikan keterkaitan informasi)</p>
		Indikator 6	✓	✓	x	x	2	<p>Instansi melaksanakan pengendalian SPBE internal dilaksanakan dan dikelola dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum disajikan Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan pengendalian SPBE 	<p>Ketika Inspektorat Jenderal sudah terlibat dalam pengendalian internal dengan melakukan Audit Internal seperti Audit Aplikasi, Infrastruktur, maupun PDN dsb dan pihak Direktorat Jenderal AHU sudah terlibat dalam pelaksanaan audit</p>

									internal atau penerapan pengendalian (koordinasi) 2. Telah terdapat Kebijakan Pengendalian internal SPBE sesuai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 27 Tahun 2019 tanggal 30 September 2019 tentang Penyelenggaraan Pengawasan di lingkungan Kemenkumham 3. Belum sesuai, pengendalian internal SPBE terhadap Perseroan Perseorangan belum dilaksanakan	dalam hal Audit yang telah dilakukan maupun audit yang masih berlangsung selama sudah terbit Surat Tugas Auditnya maka dapat diberikan Level 3. (Dalam hal Ditjen AHU telah dilakukan audit aplikasi dan infrastuktur di tahun 2023 untuk aplikasi Badan Hukum dan di tahun 2024 melakukan audit aplikasi untuk Pendaftaran perseroan Perseorangan)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

2. Manajemen (8 Aktivitas – 41 Pertanyaan)

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfirmasi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfirmasi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
1	Vito Adriano Wismar	Auditor Muda	Indikator 7	✓	✓	x	x	3	1. Sudah terdapat Notula rapat penetapan permenkumham manajemen risiko SPBE 2. Sudah terdapat Kepmenkumham manajemen risiko tahun 2023 dan sesuai/mengacu kepada Permenpanrb 5 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE 3. Sudah terdapat identifikasi dan Analisa resiko, namun tidak spesifik atas Pendaftaran Perseroan Perorangan. Identifikasi dan analisa yg ada atas layanan badan hukum secara keseluruhan dimana Pendaftaran Perseroan Perorangan termasuk didalamnya	Risiko SPBE terdapat 16 sebagaimana Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE. Apabila Manajemen Risiko SPBE yang ada saat ini belum sesuai dengan Permenpan, maka harus menyesuaikan dan dibuat spesifik per jenis layanan. Rekomendasi nantinya perlu melakukan perbaikan atas kebijakan Kepmenkumham manajemen risiko tahun 2023 dengan menyesuaikan kondisi saat ini dengan memperhatikan

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfirmasi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfirmasi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
										16 Indikator dalam Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2020.
			Indikator 8	✓	✓	x	x	3	Instansi sudah melakukan evaluasi resiko TIK/SPBE dengan penjelasan/rincian sebagai berikut: 1. Sudah terdapat Notula rapat penetapan permenkumham manajemen risiko SPBE. 2. instansi sudah melakukan evaluasi risiko TIK/SPBE namun tidak spesifik atas Pendaftaran Perseroan Perorangan. Evaluasi yg ada atas layanan badan hukum secara keseluruhan dimana Pendaftaran Perseroan Perorangan termasuk didalamnya. 3. Sudah terdapat Kepmenkumham manajemen risiko tahun 2023 dan sesuai/mengacu kepada PermenpanRB	Catatan sama dengan Indikator 8. Ingat dalam membuat Temuan dan Rekomendasi berdasarkan per Aktivitas khususnya Manajemen Risiko.
			Indikator 9	✓	✓	x	x	3	Instansi sudah melakukan rencana penanganan risiko TIK/SPBE dengan penjelasan/rincian sebagai berikut: 1. Sudah terdapat Notula rapat penetapan permenkumham manajemen risiko SPBE 2. Sudah terdapat Kepmenkumham manajemen risiko tahun 2023 dan sesuai/mengacu kepada Permenpanrb 5 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE 3. Sudah terdapat rencana	Catatan sama dengan Indikator 8. Ingat dalam membuat Temuan dan Rekomendasi berdasarkan per Aktivitas khususnya Manajemen Risiko.

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfirmasi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfirmasi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									penanganan resiko, namun tidak spesifik atas Pendaftaran Perseroan Perorangan. Identifikasi dan analisa yg ada atas layanan badan hukum secara keseluruhan dimana Pendaftaran Perseroan Perorangan termasuk didalamnya.	
			Indikator 10	✓	✓	x	x	1	Perencanaan SDM SPBE terhadap kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan belum sepenuhnya dilakukan mengacu kepada Kebijakan ditingkat Meso/Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE. Rincian terhadap dokumen pendukung sebagai berikut: 1. Notulen yang disampaikan secara substansinya bukan rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE tingkat Kementerian ataupun terhadap aplikasi pendaftaran perseroan perorangan; (LAMPIRAN KEMBALI DOKUMEN YANG LEBIH TEPAT); 2. Perencanaan SDM SPBE terhadap kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan belum sepenuhnya dilakukan mengacu kepada Kebijakan ditingkat Meso/Pedoman	<p>Kebijakan SDM SPBE minimal mengatur 4 hal yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengatur Perencanaan SDM SPBEnya; - Peningkatan Kompetensi SDM; - Pembinaan (Fungsionalnya) yang bisa dilihat dari SK PPP; - Siapa yang mengelola Aplikasi dalam hal penggunaan SDMnya, jangan sampai SDM nya yang bukan ASN. <p>Rekomendasinya dapat mengarah ke kebijakan dan bukti penerapannya khususnya dalam hal aplikasi PPP.</p>

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfirmasi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfirmasi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE.	
			Indikator 11	✓	✓	x	x	1	<p>Pengembangan kompetensi SDM SPBE telah dilakukan namun belum sepenuhnya mengacu kepada perencanaan yang tepat dan menyeluruh. Rincian terhadap dokumen pendukung sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Notulen yang disampaikan secara substansinya bukan rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE tingkat Kementerian ataupun terhadap aplikasi pendaftaran perseroan perorangan; (LAMPIRAN KEMBALI DOKUMEN YANG LEBIH TEPAT); Kebijakan internal / pedoman manajemen SDM yang dilampirkan secara substansinya belum sepenuhnya dilakukan mengacu kepada Kebijakan ditingkat Meso/Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE (masih umum) 	<p>Catatan sama dengan Indikator 10. Rekomendasinya dapat mengarah ke kebijakan dan bukti penerapannya khususnya dalam hal aplikasi PPP.</p>
			Indikator 12	✓	✓	x	x	1	Pembinaan SDM pengelola SPBE sudah dilakukan namun dilakukan tanpa adanya pedoman pembinaan	<p>Catatan sama dengan Indikator 10. Rekomendasinya dapat</p>

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfirmasi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfirmasi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									yang tepat dan spesifik terhadap pengelola SPBE. Rincian lengkap terhadap dokumen pendukung sebagai berikut: 1. Notulen yang disampaikan secara substansinya bukan rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE tingkat Kementerian ataupun terhadap aplikasi pendaftaran perseroan perorangan; (LAMPIRAN KEMBALI DOKUMEN YANG LEBIH TEPAT, dokumen yang dilampirkan lebih tepatnya menjadi laporan pelaksana. 2. Kebijakan/pedoman melakukan pembinaan SDM pengelola SPBE belum sepenuhnya dilakukan mengacu kepada Kebijakan ditingkat Meso/Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE (masih umum).	mengarah ke kebijakan dan bukti penerapannya khususnya dalam hal aplikasi PPP.
2	Elychia Roly Putri	Auditor Pertama	Indikator 13	✓	✓	✓	✓	2	Ditjen AHU mendayagunakan SDM SPBE dengan rincian sebagai berikut: 1. Terdapat notula rapat pembahasan perubahan Kepmenkumham terkait Arsitektur dan Peta Rencana SPBE oleh Pusdatin yang di dalamnya membahas Manajemen SDM TI secara umum serta notula rapat	Catatan sama dengan Indikator 10. Terkait SK Dirjen AHU Nomor: AHU-1.AH.13 Tahun 2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Dit. TI tahun 2024 dilihat lagi apakah sudah sesuai pembagian SDMnya atau tidak sehingga nantinya dapat menyesuaikan

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfirmasi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfirmasi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									<p>pembahasan usulan kebutuhan PPPK Ditjen AHU secara umum, sehingga masih diperlukan rapat pembahasan secara khusus mengenai Manajemen SDM atas Aplikasi PTP.</p> <p>2. Kebijakan internal yang dilampirkan masih berupa Permenkumham 8/2021 tentang Manajemen Karier Kemenkumham, seharusnya melampirkan Permenkumham 30/2021 tentang Penyelenggaraan SPBE Kemenkumham yang di dalamnya mencakup Manajemen SDM SPBE. Namun, belum ada kebijakan internal tingkat Ditjen AHU terkait Manajemen SDM SPBE khususnya terkait Aplikasi PTP.</p> <p>3. Terdapat SK Dirjen AHU Nomor: AHU-1.AH.13 Tahun 2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Dit. TI tahun 2024.</p>	<p>rekomendasinya, apakah SK Dirjen AHU ini harus diperbaiki atau tidak.</p>
			Indikator 14	✓	✓	x	x	2	Belum ada Dokumen Standar Data pada objek audit	<p>Standar data mengacu pada Arsitektur SPBE Kementerian sehingga masih berupa kebijakan secara umum maka level 2.</p> <p>Pernahkah Menkumham menetapkan Daftar Data di Kemenkumham? Apabila tidak</p>

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfirmasi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfirmasi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
										ada maka sangat fatal. Karena Daftar Data adalah perpaduan antara SPBE dengan Saru Data Indonesia.
			Indikator 15	✓	✓	x	x	3	Data dukung memadai	Manjemen Data, harus dipastikan kembali nilai Levelnya. Keterangan harus dijabarkan. Pernahkah Menkumham menetapkan Daftar Data di Kemenkumham? Apabila tidak ada maka sangat fatal. Karena Daftar Data adalah perpaduan antara SPBE dengan Saru Data Indonesia. Dari data dukung yang ada belum dapat menjelaskan metadata yang berisi setiap data-data dari PPP. Sehingga belum dapat Level 3, dan rekomendasinya nanti adalah metadata dari setiap data yang ada di PPP harus di definisikan.
			Indikator 16	✓	✓	x	x	3	Data dukung memadai	Manjemen Data, harus dipastikan kembali nilai Levelnya. Keterangan harus dijabarkan. Dari daftar data PPP, mana yang

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfirmasi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfirmasi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
										sudah terinteroperabilitas? Data input dan data output dari PPP mana saja dan mana yang sudah terinteroperabilitaskan. Secara pelaksanaan mungkin sudah terlaksana, namun bukti penerapannya belum terpenuhi. Apabila ada boleh diberikan Level 3 tapi apabila tidak ada maka tidak boleh.
			Indikator 17	✓	✓	✓	✓	3	Ditjen AHU menerapkan penggunaan Kode Referensi dan Data Induk pada data yang dihasilkan dengan rincian: 1. Terdapat notula rapat TL penyusunan Rancangan Permenkumham tentang Satu Data oleh Pusdatin. 2. Kebijakan internal melalui Permenkumham Nomor 12/2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kemenkumham. 3. Terdapat Kepmenkumham Nomor: M.HH-01.TI.06.03 tahun 2019 tentang Integrasi Data dan Informasi di Ling. Kemenkumham 4. Terdapat Kepmenkumham Nomor: M.HH-14.TI.05.01 tahun 2023 tentang Arsitektur SPBE Kemenkumham. 5. Telah terdapat Kode Referensi yang diterapkan pada Aplikasi PPP.	Manjemen Data, harus dipastikan kembali nilai Levelnya. Keterangan harus dijabarkan. Untuk apakah setiap data yang ada di PPP sudah ada mode referensi dan data induk? Apabila sudah ada maka dapat diberikan level 3, tapi kalau belum ada maka tidak dapat diberikan Level 3.

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfirmasi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfirmasi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
			Indikator 18	✓	✓	x	x	3	Data dukung memadai	Manjemen Data, harus dipastikan kembali nilai Levelnya. Keterangan harus dijabarkan. Terkait dengan perencanaan data pada indikator ini, apakah ada data prioritas dan ditetapkan pada aplikasi PPP? Kalau sudah ada boleh diberikan Level 3, namun kalau belum ada maka tidak diperbolehkan Level 3.
3	Sandra Nur Fitri	Auditor Pertama	Indikator 19	✓	✓	x	x	1	Belum terdapat dokumen yang diupload untuk data dukung 2 sampai dengan 5	Seharusnya dijelaskan kembali bahwa telah terdapat kebijakan terkait: 1. Kebijakan internal melalui Permenkumham Nomor 12/2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kemenkumham. 2. Terdapat Kepmenkumham Nomor: M.HH-01.TI.06.03 tahun 2019 tentang Integrasi Data dan Informasi di Ling. Kemenkumham 3. Terdapat Kepmenkumham Nomor: M.HH-14.TI.05.01 tahun 2023 tentang Arsitektur SPBE Kemenkumham. 4. Kebijakan lainnya mengenai SPBE dan kebijakan utama SPBE lainnya.

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfirmasi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfirmasi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
										Adapun Indikator 19 berbicara mengenai basis data untuk data input pada Arsitektur SPBE dari aplikasi PPP. Data Output harus diperiksa oleh Wali data yang prosesnya terlihat dalam Peraturan.
		Indikator 20		✓	✓	x	x	3	1. Telah terdapat notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan data output pada objek audit 2. Telah terdapat PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 3. Telah terdapat Kepmenkumham tentang Integrasi Data dan Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 4. Telah terdapat Kepmenkumham tentang Arsitektur SPBE 5. Dokumen Arsitektur aplikasi telah sesuai objek audit atau metadata aplikasi objek audit	Apakah telah terdapat cara memeriksa kualitas data? Tidak dapat diberikan Level 3.

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfirmasi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfirmasi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
			Indikator 21	✓	✓	x	x	2	1. telah terdapat notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi 2. telah terdapat kebijakan internal manajemen data instansi yaitu Permenkumham Nomor 12 tahun 2023 tentang penyelenggaraan satu data kemenkumham dan 3. telah terdapat kepmenkumham tentang arsitektur data dan informasi 4. belum terdapat Dokumen data instansi yang telah disebarluaskan melalui Portal SDI melalui SPLP Kemenkominfo yang menunjukkan data tersebut adalah data pada objek audit.	Belum terdapat berbagi data ke Portal Satu Data Indonesia, sehingga boleh diberikan Level 2.
			Indikator 22	✓	✓	x	x	3	1. telah terdapat notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi 2. telah terdapat kebijakan internal dan pedoman manajemen data instansi serta kepmenkumham tentang SPBE 3. telah diterapkan arsitektur data pada aplikasi perseroan perorangan	Apakah ada bukti bahwa spesifikasi dan ketentuan Data pada Aplikasi PPP diterapkan? Kalau ada boleh diberikan Level 3. Namun karena belum ada Standar Data dari PPP, maka tidak bisa memenuhi Indikator 22. Sehingga tidak dapat diberikan Level 3.

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfirmasi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfirmasi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
										spesifikasi dan ketentuan Data dimulai dari standar data, daftar data, interoperabilitas, dan basis data.
			Indikator 23	✓	✓	x	x	3	1. telah terdapat notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi 2. telah terdapat kebijakan internal dan pedoman manajemen data instansi serta kepmenkumham tentang SPBE 3. telah terdapat dokumen arsitektur aplikasi perseroan perorangan	Apakah ada bukti bahwa data yang dibagi pakai melalui SPLP kominfo? Yang artinya data input data output melalui SPLP Kominfo. Namun karena Standar Data saja belum ada sehingga data input output tidak dapat melalui SPLP Kominfo. Sehingga tidak dapat diberikan Level 3.
			Indikator 24	✓	✓	x	x	2	1. telah terdapat notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi 2. telah terdapat kebijakan internal manajemen data instansi yaitu Permenkumham tentang manajemen data, kemenkumham tentang Standar Pengelolaan Data Elektronik, kepmenkumham tentang arsitektur SPBE 3. belum terdapat dokumen alur pemeriksaan Kualitas Data pada aplikasi perseroan perorangan.	Data Prioritas belum ditetapkan. Belum terdapat dokumen alur pemeriksaan Kualitas Data pada aplikasi PPP.

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfirmasi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfirmasi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
4	Dedi Novianto	Auditor Pertama	Indikator 25	✓	✓	x	x	2	1. Sudah terdapat notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan atribut metadata layanan pada objek audit; 2. Sudah terdapat pedoman manajemen layanan SPBE instansi; 3. Sudah terdapat Arsitektur Layanan SPBE instansi.	Tidak ada catatan
			Indikator 26	✓	✓	x	x	2	1. Telah terdapat notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan katalog layanan sesuai objek audit; 2. Telah terdapat Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur katalog layanan /Arsitektur Layanan SPBE.	Tidak ada catatan
			Indikator 27	✓	✓	x	x	2	1. Sudah terdapat notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan target layanan sesuai objek audit; 2. Sudah terdapat edoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur target layanan pengguna /Arsitektur Layanan SPBE	Apabila ada bukti pengetahuan tentang PPP terkumpul dalam satu tempat dan dapat diakses (tidak boleh menggunakan google Drive) dan harus menggunakan Cloud Dir TI AHU maka dapat diberikan Level 3.
			Indikator 28	✓	✓	x	x	2	1. Sudah terdapat notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi	Apakah ada dibuktikan pengoperasian layanan bisa dilakukan 24 jam tanpa berhenti,

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfirmasi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfirmasi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									atau rapat pembahasan target pengoperasian layanan sesuai objek audit; 2. Sudah terdapat Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur target pengoperasian layanan /Arsitektur Layanan SPBE; 3. Sudah terdapat uji keberlangsungan bisnis (Business Continuity Plan) guna menjaga keberlangsungan layanan pada objek yang dimaksud.	apakah ada pengujinya? Jika ada prosedur dan pengujian serta pernah dilakukan, maka bisa level 3
			Indikator 29	✓	✓	x	x	2	1. Belum terdapat notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen pengetahuan SPBE instansi atau rapat pembahasan pengumpulan pengetahuan pada objek audit; 2. Sudah terdapat Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur pengumpulan Pengetahuan SPBE; 3. Belum terdapat dokumen yang menjelaskan bagaimana mengumpulkan Pengetahuan terkait objek audit	Seluruh dokumen terkait PPP apakah terkumpul di suatu tempat? Kalau masih beda-beda, maka tidak bisa 3. Jika ada, maka bisa 3. Manajemen pengetahuan yang terpenting adalah pengumpulannya. Untuk dipastikan terkait dengan pengumpulan pengetahuannya.
			Indikator 30	✓	✓	x	x	2	1. Belum terdapat notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen pengetahuan SPBE instansi atau rapat pembahasan penyimpanan pengetahuan SPBE pada objek audit; 2. Sudah terdapat	Apabila ada bukti pengetahuan tentang PPP terkumpul dalam satu tempat dan dapat diakses (tidak boleh menggunakan google Drive) dan harus menggunakan Cloud Dir TI AHU

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfirmasi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfirmasi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur Penyimpanan Pengetahuan SPBE; 3. Belum terdapat tempat penyimpanan pengetahuan terkait objek audit.	maka dapat diberikan Level 3.
5	Silvina Sari	Auditor Pertama	Indikator 31	✓	✓	x	x.	2	1. Dokumen yang dilampirkan berupa undangan dan notula, namun kegiatan yang berbeda. notula rapat BPSDM berisi tentang pembangunan fitur aplikasi rumah belajar kumham. Sehingga dokumen notula dilampirkan belum memenuhi dokumen yang dipersyaratkan yaitu pembahasan pengolahan pengetahuan pada objek audit. 2. Sudah adanya pedoman manajemen pengetahuan instansi melalui Permenkumham 26/2022 dan panduan penggunaan aplikasi elearning 3. Sudah adanya panduan pendaftaran perseroan perorangan yang ada pada laman ahu.go.id sebagai Pengolahan Pengetahuan terhadap objek audit untuk memudahkan pengambilan keputusan.	Tidak Ada Catatan.
			Indikator 32	✓	✓	x	x.	2	1. Dokumen yang dilampirkan berupa undangan dan notula, namun kegiatan yang berbeda. notula rapat BPSDM berisi tentang pembangunan	Tidak Ada Catatan.

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfirmasi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfirmasi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									fitur aplikasi rumah belajar kumham. Sehingga dokumen notula dilampirkan belum memenuhi dokumen yang dipersyaratkan yaitu pembahasan pengolahan pengetahuan pada objek audit. 2. Sudah adanya pedoman manajemen pengetahuan instansi. 3. Sudah melaksanakan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan bukti dokumen teknis PTP yang terlampir.	
		Indikator 33		✓	✓	x	x	3	1. Sudah terdapat notula penyusunan manajemen perubahan Kementerian Hukum dan HAM 2. Sudah ditetapkan dokumen pedoman Manajemen Perubahan SPBE yang di dalamnya mengatur perencanaan perubahan, analisis, implementasi, pengembangan, evaluasi dan pementauan perubahan SPBE 3. Sudah terdapat dokumen Perencanaan perubahan yang dibuktikan dengan hasil penyusunan kebutuhan TIK yang menjelaskan terkait keterangan perubahan beserta alasan perubahan	Manajemen perubahan (33-37) = ada rencana perubahan. Belum terdapat pedoman manajemen perubahan. Mengacu pada PANRB. Kebijakan belum ada, maka nilainya 1. Rekomendasi: walaupun belum didukung kebijakan, namun sudah diterapkan.

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfirmasi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfirmasi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
			Indikator 34	✓	✓	x	x	2	1. Telah dilampirkan notula rapat pembahasan analisis perubahan dengan rapat dengan unit teknis terkait kebutuhan atau perubahan 2. Sudah terdapat ditetapkan dokumen pedoman Manajemen Perubahan SPBE yang di dalamnya mengatur analisis perubahan SPBE 3. Dokumen yang dilampirkan berupa MINUTES OF MEETING/MoM (notula), belum melampirkan dokumen Laporan pelaksanaan analisis perubahan yang dipersyaratkan.	Manajemen perubahan (33-37) = ada rencana perubahan. Belum terdapat pedoman manajemen perubahan. Mengacu pada PANRB. Kebijakan belum ada, maka nilainya 1. Rekomendasi: walaupun belum didukung kebijakan, namun sudah diterapkan.
			Indikator 35	✓	✓	x	x	2	1. Sudah terdapat notula rapat pembahasan pengembangan aplikasi Layanan Badan Hukum 2. Sudah ditetapkan dokumen pedoman Manajemen Perubahan SPBE yang mengatur pengembangan perubahan SPBE 3. Dokumen yang dilampirkan berupa MINUTES OF MEETING/MoM (notula), belum melampirkan dokumen Laporan pelaksanaan pengembangan perubahan yang dipersyaratkan.	Manajemen perubahan (33-37) = ada rencana perubahan. Belum terdapat pedoman manajemen perubahan. Mengacu pada PANRB. Kebijakan belum ada, maka nilainya 1. Rekomendasi: walaupun belum didukung kebijakan, namun sudah diterapkan.
			Indikator 36	✓	✓	x	x	2	1. Sudah melampirkan notula rapat implementasi perubahan 2. Sudah ditetapkan dokumen pedoman Manajemen Perubahan SPBE yang mengatur implementasi	Manajemen perubahan (33-37) = ada rencana perubahan. Belum terdapat pedoman manajemen perubahan. Mengacu pada PANRB.

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfirmasi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfirmasi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									perubahan SPBE 3. Sudah terdapat dokumen Deployment sebagai tahap pelaksanaan implementasi perubahan pada Aplikasi Admin Perseoran Perorangan. Namun belum melampirkan laporan pelaksanaan implementasi yang dipersyaratkan.	Kebijakan belum ada, maka nilainya 1. Rekomendasi: walaupun belum didukung kebijakan, namun sudah diterapkan.
6	Indah Pertiwi	Auditor Pertama	Indikator 37	✓	✓	x	x	1	1. Notulen rapat pembahasan bukan berkaitan dengan penetapan pedoman manajemen perubahan SPBE instansi atau rapat evaluasi dan pemantauan perubahan pada objek audit. Data dukung merupakan rapat Penyusunan Kebijakan terkait arsitektur SPBE 2. Pedoman Manajemen Perubahan yang belum ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur evaluasi dan pemantauan perubahan SPBE	Tidak Ada Catatan.
			Indikator 38	✓	✓	x	x	3	1. Sudah terdapat notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen Aset TIK instansi atau rapat perencanaan kebutuhan objek audit 2. Sudah terdapat Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan aset TIK / Arsitektur aplikasi SPBE 3. Sudah terdapat Dokumen	Manajemen aset sudah baik

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfirmasi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfirmasi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									perencanaan aset TIK objek audit berupa Aplikasi Perseroan Perorangan	
			Indikator 39	✓	✓	x	x	3	1. Sudah terdapat notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen Aset TIK instansi atau rapat pengadaan objek audit 2. Sudah terdapat Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur pengadaan aset TIK /Arsitektur aplikasi SPBE 3. Sudah terdapat Dokumen pengadaan aset TIK objek audit berupa Aplikasi Pendaftaran Perseroan Perorangan	Manajemen aset sudah baik
			Indikator 40	✓	✓	x	x	2	1. Sudah terdapat Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen Aset TIK instansi atau rapat pengelolaan objek audit 2. Sudah terdapat Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur pengelolaan aset TIK. /Arsitektur aplikasi SPBE 3. Belum terdapat Dokumen pengelolaan aset TIK objek audit berupa Aplikasi Perseroan Perorangan yang mana belum dilampirkan penetapan Aplikasi Perseroan Perorangan sebagai BMN	Manajemen aset sudah baik

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfirmasi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfirmasi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
			Indikator 41	✓	✓	✓	✓	2	1. Belum terdapat Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen Aset TIK instansi atau rapat penghapusan objek audit 2. Sudah terdapat Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur penghapusan aset TIK / Arsitektur aplikasi SPBE 3. Sudah terdapat dokumen penghapusan aset TIK berupa aplikasi-aplikasi yang sudah tidak digunakan berupa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Arsip	Manajemen aset sudah baik
			Indikator 42	✓	✓	✓	✓	3	1. Sudah terdapat Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan pemberian bantuan terhadap permintaan layanan objek audit 2. Sudah terdapat Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pemberian bantuan terhadap permintaan layanan /Arsitektur Layanan SPBE 3. Sudah terdapat Formulir permintaan layanan objek audit berupa Aplikasi Perseroan Perorangan	Manajemen layanan sudah baik, sehingga untuk operasional layanan nilai minimal 2

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfirmasi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfirmasi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
7	Y. Aditya Anggara P.	Auditor Pertama	Indikator 43	✓	✓	x	x	3	1. Telah Terdapat Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan penanganan gangguan layanan objek audit. 2. Telah terdapat Dokumen Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur penanganan gangguan layanan /Arsitektur Layanan SPBE. 3. Telah terdapat Formulir penanganan gangguan layanan objek audit.	Tidak Ada Catatan
			Indikator 44	✓	✓	x	x	2	1. Telah terdapat Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan pemantauan dan pemeliharaan layanan objek audit. 2. Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pemantauan dan pemeliharaan layanan /Arsitektur Layanan SPBE. 3. Belum terdapat Laporan Ketersediaan Layanan objek audit. Yang telah diunggah adalah bukti screenshoot, belum dalam laporan yang menjelaskan objek audit	Tidak Ada Catatan

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfirmasi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfirmasi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
			Indikator 45	✓	✓	x	x	3	1. Telah terdapat Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan pemulihan layanan objek audit. 2. Telah terdapat Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pemulihan layanan /Arsitektur Layanan SPBE. 3. Telah terdapat Laporan Hasil Pengujian BCP oleh pihak eksternal (Laporan Evaluasi DRP objek audit)	Tidak Ada Catatan
			Indikator 46	✓	✓	x	x	2	1. Telah terdapat Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan rilis layanan objek audit. 2. Telah terdapat Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur rilis layanan /Arsitektur Layanan SPBE. 3. Dokumen rencana rilis objek audit belum disahkan oleh pejabat yang berwenang	Tidak Ada Catatan
			Indikator 47	✓	✓	x	x	2	1. Telah terdapat Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan evaluasi	Tidak Ada Catatan

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfirmasi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfirmasi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									pelaksanaan operasional layanan objek audit. 2. Telah terdapat Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur evaluasi pelaksanaan operasional layanan /Arsitektur Layanan SPBE. 3. Laporan evaluasi (keseluruhan pelaksanaan kegiatan operasional layanan) objek audit belum disahkan (belum terdapat tandatangan) pejabat yang berwenang	

3. Fungsionalitas dan Kinerja (12 Aktivitas – 58 Pertanyaan)

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
1	Dhony Alfianto	Auditor Muda	Indikator 48	✓	✓	x	x	1	Kebijakan yang dilampirkan adalah kebijakan tentang SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS bukan terkait Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur proses bisnis dan layanan	*Pemenuhan level 2 dan 3 terdapat pada Kepmenkumham Nomor: M.HH-14.TI.05.01, Arsitektur Proses Bisnis terdapat pada hal 41 namun atribut metadata belum sesuai dengan SE Menpanrb 18 2022. *Dapat memenuhi level 2
			Indikator 49	✓	✓	x	x	3	Data dukung memadai	Sesuai. M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 hal 9 (level 2), dan Master Dokumentasi Pendirian Aplikasi PPP
			Indikator 50	✓	✓	x	x	3	Data dukung memadai	Sesuai. M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 hal 9, 2. a. 1) b);, dan Master Dokumentasi Pendirian Aplikasi PPP, hal 12
			Indikator 51	✓	✓	x	x	1	Belum terdapat Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur fungsional dan non-fungsional aplikasi	Dok. Software requirement specification Aplikasi PPP. *Dapat memenuhi level 2, meskipun konten dok. kebijakan belum lengkap
			Indikator 52	✓	✓	x	x	2	1. Notulen belum menggambarkan keterpaduan layanan perseroan perorangan	Pemenuhan level 2 dan 3 terdapat pada Kepmenkumham Nomor: M.HH-14.TI.05.01, Arsitektur Proses Bisnis terdapat

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									2. Belum terdapat doukumen yang menggambarkan dan penjelasan relasional arsitektur objek audit sebagai layanan yang terintegrasi antara proses bisnis, layanan, data dan informasi. 3.	pada hal 41, data informasi terdapat pada hal 92, namun belum lengkap karena belum memuat ID metadata terkait pada setiap atribut metadata sesuai SE Menpanrb 18 2022;
2	Erap Nainggolan	Auditor Pertama	Indikator 68	✓	✓	X	X	1	4. Belum terdapat dokumen level 2 berupa kebijakan pengembangan aplikasi SPBE Kemenkumham seperti Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 tentang Standar Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. 5. Pada dokumen level 3 (bukti penerapan) telah terdapat dokumen source code GitLab, namun demikian perlu dilengkapi dengan dokumentasi fitur back end yang dapat mengintegrasikan aplikasi PTP dengan layanan/aplikasi SPBE lainnya (dokumentasi bisa berupa capture source code maupun capture tools yang sudah GUI)	Konten dok. kebijakan perlu dilengkapi lebih lanjut terkait kode sumber aplikasi dapat dimodifikasi / open source dan memiliki kemampuan untuk dapat diintegrasikan. *Adanya kebijakan memenuhi level 2, meskipun belum lengkap.

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
			Indikator 69	✓	✓	X	X	1	1. Belum terdapat dokumen level 2 berupa kebijakan pengembangan aplikasi SPBE Kemenkumham seperti Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 tentang Standar Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. 2. Pada dokumen level 3 (bukti penerapan) telah terdapat dokumen source code GitLab, namun demikian perlu dilengkapi dengan dokumentasi atau capture arsitektur source code yang bersifat model view controller (mvc) program framework yang digunakan	Konten dok. kebijakan perlu dilengkapi lebih lanjut terkait kode sumber aplikasi bersifat modular. *Memenuhi level 2
			Indikator 70	✓	✓	✓	✓	3	Terdapat kesalahan konfirmasi, dimana catatan konfirmasi belum diubah saat konfirmasi ke dua. Sedangkan jawaban pada Tahap II telah dilakukan perbaikan dan telah memenuhi level 3	Konten dok. kebijakan terdapat pada Kepmenkumham Nomor: M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 hal 7 huruf C. 4. Namun belum membahas penyimpanan kode sumber. *Memenuhi level 2
			Indikator 71	✓	✓	✓	✓	3	Telah terdapat dokumen yang memadai hingga level 3	Terdapat undangan rapat Paket Pekerjaan Pemeliharaan AHU Online; Konten dok. kebijakan terdapat pada Kepmenkumham Nomor: M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 hal 15 Nomor 6.

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
			Indikator 88	✓	✓	X	X	2	Dokumen Level 2 (dokumen kebijakan) yang seharusnya diupload adalah dokumen kebijakan layanan Pusat Data Kemenkumham seperti Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.TI.05.02 TAHUN 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Data Dan Ruang Server di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Sudah sesuai, untuk pembahasan dalam bentuk rapat yang membahas terkait infrastruktur pendukung Aplikasi PPP belum dilakukan. Kebijakan terkait Pusat data sudah tercantum dan sudah membahas terkait pemanfaatan / keterhubungan dengan PDN dalam Permenkumham No.30 Tahun 2021. Bukti penerapan Pemanfaatan Teknologi Cloud PDN belum dilakukan untuk Aplikasi PPP
			Indikator 89	✓	✓	X	X	2	1. Dokumen Level 2 (dokumen kebijakan) yang seharusnya diupload adalah dokumen kebijakan layanan SPLP Kemenkumham seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kemenkumham 2. Belum dapat berada pada level 3 karena keterhubungan aplikasi PTP dilaksanakan secara point to point antara AHU dengan instansi lain, belum dilakukan melalui wali data Kemenkumham yakni	Sudah sesuai, untuk pembahasan dalam bentuk rapat yang membahas terkait infrastruktur pendukung Aplikasi PPP belum dilakukan. Kebijakan terkait SPLP sudah tercantum dan sudah membahas terkait penggunaan SPLP / SPL pada Permenkumham No.30 Tahun 2021.. Untuk bukti penerapan belum dilakukan interoperabilitas data Aplikasi PPP menggunakan SPLP/SPL.

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									Pusdatin sebagai penghubung ke SPLP, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Hukum	
			Indikator 90	✓	✓	X	X	3	Dokumen yang disajikan telah memenuhi hingga level 3, namun seharusnya dokumen atribut metadata sistem penghubung layanan aplikasi PTP agar disesuaikan dengan ketentuan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-14.TI.05.01 Tahun 2023 tentang Arsitektur SPBE Kemenkumham	<p>Belum sesuai, untuk pembahasan dalam bentuk rapat yang membahas terkait infrastruktur pendukung Aplikasi PPP belum dilakukan. sudah memiliki kebijakan terkait Arsitektur SPBE pada Kepmen No M.HH-14 TI.05.01 Tahun 2023. Namun di dalam kebijakan belum tepat untuk penerapan atribut metadata SPLP-nya.</p> <p>Seharusnya disesuaikan ke Level 2.</p>
			Indikator 91	✓	✓	X	X	2	Bukti dukung level 3 agar dilengkapi dengan data dukung penggunaan storage cloud untuk back up maupun upload data	<p>Sudah sesuai, untuk pembahasan dalam bentuk rapat yang membahas terkait infrastruktur pendukung Aplikasi PPP belum dilakukan. sudah memiliki kebijakan terkait Arsitektur SPBE pada Kepmen No M.HH-14 TI.05.01 Tahun 2023. Namun di dalam kebijakan belum tepat untuk penerapan atribut metadata Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi -nya.</p>

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
3	Suciati Kristiasari	Auditor Pertama	Indikator 53	✓	✓	X	X	2	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sudah terdapat Notulen Rapat Pembahasan Hasil Pengembangan Aplikasi PTP. 2. Sudah terdapat kebijakan berupa Permenkumham Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE. Namun, perlu dilengkapi dengan Kepmenkumham Nomor: M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 tentang Standar Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kemenkumham. 3. Sudah terdapat Arsitektur Proses Bisnis. 4. Sudah terdapat Arsitektur Aplikasi PTP. 5. Sudah terdapat Dokumen Software Requirement Specification Aplikasi PTP. 	<p>Sesuai.</p> <p>Tidak ada dokumen <i>Service Level Agreement</i> Aplikasi PPP untuk mencapai Level 3.</p>
			Indikator 54	✓	✓	X	X	2	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sudah terdapat Notulen Rapat Pembahasan Hasil Pengembangan Aplikasi PTP yang memuat pembahasan mengenai fungsi Aplikasi PTP. 2. Belum terdapat Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE yang mengatur fungsi aplikasi (dokumen tidak dapat dibuka) 3. Sudah terdapat Arsitektur Proses Bisnis. 	<p>Konten dok. kebijakan terdapat pada Kepmenkumham Nomor: M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 hal 9, Nomor 2. a. 2);; *Dapat memenuhi level 3</p>

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									4. belum terdapat Arsitektur Aplikasi PTP. 5. Sudah terdapat Kerangka Acuan Kerja Paket Pekerjaan Pembuatan Aplikasi PTP yang di dalamnya memuat penjelasan proses, fungsi, dan layanan Aplikasi PTP.	
			Indikator 56	✓	✓	X	X	1	1. Belum terdapat notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan kemampuan kerja Aplikasi PTP. 2. Belum terdapat dokumen kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE yang mengatur kemampuan kerja aplikasi 3. Sudah terdapat Arsitektur Proses Bisnis. 4. Sudah terdapat Arsitektur Aplikasi PTP. 5. Belum terdapat dokumen kebutuhan khusus terkait kemampuan kerja Aplikasi PTP.	Konten dok, kebijakan terdapat pada Kepmenkumham Nomor: M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 hal 9, no 2; dan penerapan pada Master Dokumentasi Pendirian Aplikasi PPP hal 14 D. <i>Requirement Definition.</i> *Dapat memenuhi level 3
			Indikator 57	✓	✓	X	X	3	1. Sudah terdapat Notula Konsinyering Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kemenkumham yang di dalamnya membahas terkait metadata Aplikasi PTP.	Sesuai. Konten dok, kebijakan terdapat pada Kepmenkumham Nomor: M.HH-14.TI.05.01, Arsitektur Aplikasi terdapat pada hal 164.

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									<p>2. Sudah terdapat kebijakan berupa Kepmenkumham Nomor M.HH-14.TI.05.01 Tahun 2023 tentang Arsitektur SPBE Kemenkumham.</p> <p>3. Sudah terdapat Arsitektur Proses Bisnis.</p> <p>4. Sudah terdapat Arsitektur Aplikasi PTP.</p> <p>5. Sudah terdapat dokumen Kebutuhan Khusus terkait Atribut Metadata Aplikasi PTP yang tertuang dalam Arsitektur SPBE Kemenkumham.</p>	Terdapat Notulen pembahasan arsitektur SPBE.
			Indikator 58	✓	✓	X	X	3	<p>1. Sudah terdapat Laporan Konsinyasi Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas yang membahas terkait batasan khusus Aplikasi PTP.</p> <p>2. Sudah terdapat kebijakan berupa Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.</p> <p>3. Sudah terdapat Arsitektur Proses Bisnis.</p>	Sesuai. Konten dok, kebijakan terdapat pada M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 hal 8. Terdapat notulen rapat pembahasan pengembangan aplikasi No: AHU.6.AH.13.01-29;

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									4. Sudah terdapat Dokumen Software Requirement Specification Aplikasi PTP.	
4	Cindy Claudia Sari	Auditor Pertama	Indikator 59	✓	✓	X	X	3	<ul style="list-style-type: none"> 1. Telah dilampirkan Dokumen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan sudah dilakukan dimana pembahasannya menyebutkan mengenai kebijakan pengembangan Aplikasi Perseroan Perorangan. 2. Telah dilampirkan Dokumen Kebijakan yang ditandatangani Menteri sudah dilampirkan berupa Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan hukum Perseroan Terbatas. 3. Telah dilampirkan Dokumen Arsitektur Proses Bisnis instansi dan Arsitektur Aplikasi Instansi berupa Kebijakan turunan pada Unit Eselon I, namun tetap masukan dokumen Arsitektur SPBE Kepmenkumham sebagai acuan awal dokumen turunan UE I. 	<p>Konten dok. kebijakan perlu dilengkapi lebih lanjut terkait skalabilitas dan performa di masa depan. Dokumen kebutuhan yang dimaksud pada level 3 adalah skalabilitas uji beban. *Memenuhi sampai level 2</p>

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									4. Telah dilampirkan dokumen berupa laporan vulnerability assessment yang merupakan bagian penetration test yang dapat dijadikan dokumen kebutuhan khusus terkait skalabilitas dan kinerja.	
			Indikator 65	✓	✓	✓	✓	2	1. Telah dilampirkan Dokumen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan sudah dilakukan dimana pembahasannya menyebutkan mengenai kebijakan pengembangan Aplikasi Perseroan Perorangan. 2. Telah dilampirkan Kebijakan berupa Kepmenkumham Nomor M.HH-05.TI.05.03 Tahun 2017 Tentang Grand Design TI dan Kepmenkumham Nomor M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 Tentang Standar Pengembangan Sistem Informasi. 3. Metode Pengembangan aplikasi yang digunakan menggunakan pengembangan dengan pendekatan DevOps	Konten dok. kebijakan perlu dilengkapi lebih lanjut terkait metode pengembangan aplikasi.

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									yang merupakan development yang menggunakan prinsip agile (Kolaborasi,komunikasi, menggunakan tools yang tepat), namun dalam dokumen membahas pengembangan aplikasi secara menyeluruh untuk semua aplikasi pada Ditjen AHU dan tidak membahas metode pengembangan objek audit yaitu Perseroan Perseorangan secara spesifik dan mendetail. (tetap level 2).	
			Indikator 66	✓	✓	✓	✓	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilampirkan Dokumen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan sudah dilakukan dimana pembahasannya menyebutkan mengenai kebijakan pengembangan Aplikasi Perseroan Perorangan. 2. Telah dilampirkan Kebijakan berupa Kepmenkumham Nomor M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 Tentang Standar 	Konten dok kebijakan terdapat pada Kepmenkumham Nomor: M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 hal 10 huruf c.

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									Pengembangan Sistem Informasi dan Kepmenkumham Nomor M.HH-14.TI.05.01 Tahun 2023 tentang Penetapan Arsitektur SPBE 3. Aplikasi Pendaftaran Perseroan Perorangan telah memiliki dokumentasi aplikasi yang memuat penjelasan dari setiap fungsi kode sumber, Metadata, kamus data, format data, dan lain sebagainya yang sudah dijelaskan dalam dokumen Master Dokumentasi Aplikasi Pendaftaran Perseroan Perorangan dan tangkapan layar tools/repository kode AHU (gitlab.ahu.go.id).	
			Indikator 67	✓	✓	✓	✓	3	1. Telah dilampirkan Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan daftar komponen aplikasi perseroan yang dapat digunakan kembali di masa yang akan datang antara Ditjen AHU dengan Pihak Ketiga PT. EDI Indonesia.	Konten dok. kebijakan terdapat pada Kepmenkumham Nomor: M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 hal 8 huruf A. 1) b.

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									<p>2. Telah dilampirkan Dokumen turunan Unit Eselon I yang menjelaskan repository aplikasi (Tempat penyimpanan dari kumpulan software/aplikasi yang bisa didownload untuk digunakan atau dapat diartikan sebuah arsip software yang ada pada media penyimpanan atau internet.) berupa Tabel-tabel tempat penyimpanan data Pendirian pada basis data untuk Aplikasi Pendaftaran Pendirian Perseroan.</p> <p>3. Dokumen Daftar komponen aplikasi PSP yang dapat dimanfaatkan kembali di masa yang akan datang telah dilampirkan berupa screenshot Repository Gitlab AHU.</p>	
			Indikator 78	✓	✓	X	X	2	<p>1. Telah dilampirkan Dokumen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan sudah dilakukan dimana pembahasannya menyebutkan mengenai kebijakan</p>	Terdapat notulen rapat yang membahas kebijakan pengembangan Aplikasi PPP; Konten dok. kebijakan terdapat pada Kepmenkumham Nomor: M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 hal 13; Belum terdapat gambaran alur instalasi pada dokumen Deployment CR-PTP 004.

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									<p>pengembangan Aplikasi Perseroan Perorangan.</p> <p>2. Dokumen Kebijakan Arsitektur masih menggunakan yang tahun 2021 sedangkan terdapat Arsitektur Kemenkumham Versi terbaru di tahun 2023. Adapun kebijakan yang dilampirkan belum terdapat poin mengenai bagaimana tata cara/prosedur instalasi perseroan perseorangan. Mungkin bisa ditambahkan user manual instalasi/pemasangan aplikasi PTP yang merupakan turunan unit eselon I nya.</p> <p>3. Dokumen level 3 yang dilampirkan berupa Proses Deployment, namun gambaran dan penjelasan prosedur atas instalasi Aplikasi PSP nya belum terlihat alurnya. mohon untuk dijabarkan lebih lanjut dan diberikan penjelasan lebih rinci.</p>	
5	Dian Lati Utami	Auditor Pertama	Indikator 79	✓	✓	x	x	3	Instansi sudah memiliki daftar personil yang bertugas untuk melakukan instalasi/pemasangan aplikasi dengan penjelasan/rincian	Terdapat notulen rapat yang membahas SDM; Konten dok. kebijakan terdapat pada Kepmenkumham Nomor: M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 hal 13;

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									sebagai berikut: 1. Sudah terdapat Notula rapat pembahasan daftar personil yang melakukan pemasangan aplikasi 2. Sudah terdapat Permenkumham Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kemenkumham dan Kepmenkumham Nomor M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 tentang Standar Pengembangan Sistem Informasi di lingkungan Kemenkumham 3. Sudah terdapat Daftar SDM, kompetensi dan tugas personel yang sudah dilakukan proses klarifikasi dalam Berita Acara Klarifikasi Personel/Tenaga Ahli Pemeliharaan Sarana TIK Nomor AHU.1.PB.02.01.C-131/2022	Terdapat daftar SDM dan kompetensinya pada dok. Deployment CR-PTP 004.
			Indikator 80	✓	✓	x	x	2	Rencana pelatihan terhadap personil yang melakukan instalasi (pemasangan) aplikasi sebagai berikut: 1. Notula Rapat pembahasan rencana pelatihan personil yang	Konten dok. kebijakan terdapat pada Kepmenkumham Nomor: M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 hal 13. Belum terdapat dok. rencana pelatihan untuk instalasi

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									<p>melakukan pemasangan aplikasi dilampirkan dengan Notula Rapat Transfer Knowledge Aplikasi SABH, SABU, dan PTP</p> <p>2. Sudah terdapat Permenkumham Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kemenkumham dan Kepmenkumham Nomor M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 tentang Standar Pengembangan Sistem Informasi di lingkungan Kemenkumham</p> <p>3. Belum terdapat dokumen yang menjelaskan rencana pelatihan pemasangan aplikasi objek audit</p>	
			Indikator 81	✓	✓	x	x	3	<p>Telah terdapat Jadwal instalasi (pemasangan) aplikasi dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>1. Sudah terdapat dokumen rapat pembahasan jadwal pemasangan aplikasi dilampirkan dengan dokumen Deployment CR-004</p>	<p>Kebijakan pada Kepmenkumham Nomor: M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 belum memuat ketentuan jadwal pelaksanaan instalasi.</p> <p>*Memenuhi sampai level 2</p>

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									<p>2. Sudah terdapat Permenkumham Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kemenkumham dan Kepmenkumham Nomor M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 tentang Standar Pengembangan Sistem Informasi di lingkungan Kemenkumham</p> <p>3. Sudah terdapat dokumen jadwal instalasi aplikasi dilampirkan dengan dokumen Deployment CR-004</p>	
			Indikator 82	✓	✓	x	x	3	<p>Instansi telah memiliki daftar fasilitas yang dibutuhkan selama proses instalasi (pemasangan) aplikasi dengan penjelasan sbb:</p> <p>1. Notula rapat pembahasan daftar fasilitas pemasangan aplikasi yang dilampirkan merupakan notula Pembahasan Revisi SOP Proses Pengembangan Aplikasi</p> <p>2. Sudah melampirkan Kepmenkumham Nomor M.HH-14.TI.05.01 Tahun 2023 tentang Arsitektur SPBE Kemenkumham</p>	<p>Kebijakan pada Kepmenkumham Nomor: M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 belum memuat ketentuan jadwal pelaksanaan instalasi.</p> <p>*Memenuhi sampai level 2</p>

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									3. Sudah melampirkan KAK Perseroan Perorangan yang terdapat spesifikasi kebutuhan fungsional dan nonfungsional	
			Indikator 83	✓	✓	x	x	3	<p>Aplikasi Pendaftaran Perseroan Perorangan telah berkolaborasi dengan aplikasi lain, dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah terdapat Notula rapat pembahasan API/kolaborasi aplikasi dengan melampirkan notula Pembahasan Revisi SOP Proses Pengembangan Aplikasi 2. Sudah terdapat SOP Pengembangan Aplikasi, Permenkumham Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kemenkumham dan Kepmenkumham Nomor M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 tentang Standar Pengembangan Sistem Informasi di lingkungan Kemenkumham, dan Kepmenkumham Nomor M.HH-14.TI.05.01 Tahun 2023 tentang Arsitektur SPBE Kemenkumham 3. Sudah terdapat Dokumentasi API objek audit dan layanan yang 	<p>Sudah sesuai, karena di dalam aktivitas sudah dilakukan pembahasan terkait operasional pada aplikasi; sudah memiliki Kepmen No.M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 Tentang Standar Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kemenkumham yang membahas terkait integrasi dengan sistem informasi (lainnya); dan bukti penerapan kolaborasi dengan aplikasi lain.</p>

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									terhubung ke aplikasi Pendaftaran PP	
6	Saadia Santi	Auditor Pertama	Indikator 84	✓	✓	x	x	1	<p>1. Telah terdapat Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi berupa notula Konsiyering Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>2. Telah terdapat kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi berupa screenshot permenkumham no 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di lingkungan kemenkumham, namun belum mengatur manual aplikasi khususnya terkait Pendaftaran Perseroan Perseorangan.</p> <p>3. Telah terdapat manual penggunaan aplikasi bagi administrator objek audit, yaitu panduan pengguna admin Perseroan perseorangan dan manual penggunaan aplikasi bagi pengguna objek audit, yaitu panduan</p>	<p>Belum sesuai, karena di dalam kebijakan Permenkumham No.30 Tahun 2021 Tentang SPBE di Lingkungan Kemenkumham Pasal 34 sudah membahas terkait dokumentasi aplikasi Proses Bisnis, desain aplikasi, struktur program, prosedur standar manual, kebutuhan sumber daya informatika, hak akses, dan analisa risiko. dan sudah memiliki manual untuk pengguna dan manual untuk administrator.</p> <p>Seharusnya dapat naik ke Level 2/3.</p>

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									pendaftaran Perseroan perseorangan yang terdapat pada aplikasi AHU ONLINE	
			Indikator 85	✓	✓	x	x	1	<p>1. Telah terdapat Undangan/Notulen rapat pembahasan kebutuhan akses data teknologi informasi</p> <p>2. Telah dilampirkan kebijakan berupa kepmenkumham Nomor: M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 tentang Standar Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, namun belum terdapat kebijakan layanan bantuan bisnis kepada pengguna aplikasi dan teknis aplikasi khususnya aplikasi ESTIM yang digunakan.</p> <p>3. Telah terdapat dokumen log/proses layanan bantuan (help desk) proses bisnis dan teknis operasional objek audit berupa screenshot servicedesk AHU</p>	<p>Belum sesuai, sudah memiliki kebijakan terkait Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi pada Kepmen No.M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 Tentang Standar Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kemenkumham. Namun di dalam kebijakan belum membahas terkait pemberian bantuan layanan bisnis atau teknis. Untuk bukti penerapan sudah dilakukan (ESTIM)</p> <p>Seharusnya dapat naik ke Level 2.</p>
			Indikator 86	✓	✓	x	x	0	1. Belum terdapat Undangan/Notulen	Belum sesuai, sudah memiliki kebijakan terkait Pembangunan

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan FAQ aplikasi 2. Belum terdapat Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur FAQ proses bisnis kepada pengguna dan teknis aplikasi 3. Belum terdapat Dokumen Daftar FAQ proses bisnis dan teknis operasional objek audit	dan Pengembangan Aplikasi pada Permenkumham No.30 Tahun 2021 Tentang SPBE di Lingkungan Kemenkumham Pasal 34. Namun di dalam kebijakan belum membahas terkait FAQ dan bukti penerapan belum dilakukan. Seharusnya dapat naik ke Level 2.
		Indikator 87		✓	✓	x	x	2	1. Data dukung notula rapat belum menggambarkan pembahasan kebutuhan kapasita dan tingkat layanan 2. Telah terdapat kebijakan internal layanan SPLP terkait pengoperasian, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data terkait pengoperasian, dan Kebijakan Internal Layanan JIP terkait pengoperasian 3. Dokumen perencanaan infrastruktur belum menggambarkan sesuai kebutuhan kapasitas aplikasi	Sudah sesuai, untuk pembahasan dalam bentuk rapat yang membahas terkait infrastruktur pendukung Aplikasi PPP belum dilakukan. Kebijakan terkait SPLP, Pusat Data, dan JIP sudah tercantum dalam Permenkumham No.30 Tahun 2021 Tentang SPBE di Lingkungan Kemenkumham. Bukti penerapan dalam dokumentasi infrastruktur Aplikasi PPP belum tergambar dengan jelas terkait spesifikasi

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									dan tingkat layanan. Data dukung yang diupload hanya terbatas pada Arsitektur Diagram Aplikasi Pendirian Perseroan Perorangan	infrastruktur pendukung untuk Aplikasi PPP.
			Indikator 92	✓	✓	x	x	2	1.Telah dilampirkan surat edaran dari pusdatin terkait jaringan intra di lingkungan kemenkumham, namun belum terdapat Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kinerja jaringan aplikasi yang di audit atau simpul jaringan 2. Telah dilampirkan permenkumham no 30 tahun 2021 tentang SPBE dan kepmenkumham no M.HH-15.TI.05.01 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE 3. Belum terdapat dokumen Prosedur pengoperasian JIP dan Konfigurasi jaringan	Sudah sesuai, sudah dilakukan Konsinyering Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kemenkumham yang salah satunya membahas terkait atribut metadata SPBE. Kebijakan Permenkumham No.30 Tahun 2021 belum secara eksplisit membahas terkait penggunaan JIP untuk aplikasi / backend suatu aplikasi untuk unit kerja atau satuan di bawahnya. Bukti penerapan prosedur pengoperasian dan konfigurasi jaringan belum tersedia.
7	Ahmadi Anjas	Auditor Pertama	Indikator 93	✓	✓	✓	✓	3	1. Telah dilampirkan Surat dari Pusdatin tahun 2020 terkait pengelolaan jaringan infra. Belum terdapat rapat yang membahas kinerja aplikasi dan penanganan	Belum sesuai, Kebijakan Permenkumham No.30 Tahun 2021 belum secara eksplisit membahas terkait penggunaan JIP untuk aplikasi / backend

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									<p>gangguan dalam rangka pengoperasian jaringan aplikasi pendaftaran perseroan perorangan.</p> <p>2. Telah dilampirkan Permenkumham Nomor 30 tahun 2021 tentang SPBE, Permenkumham Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kemenkumham, Kepmenkumham Nomor: M.HH-14.TI.05.01 Tahun 2023 tentang Arsitektur SPBE Kemenkumham dan Kepmenkumham Nomor: M.HH-15.TI.05.01 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE Kemenkumham Periode 2023-2024.</p> <p>3. Telah dilampirkan laporan/rekam jejak penanganan gangguan jaringan</p>	<p>suatu aplikasi untuk unit kerja atau satuan di bawahnya. Bukti penerapan Prosedur penanganan gangguan jaringan belum tersedia dan Telah dilampirkan laporan/rekam jejak penanganan gangguan jaringan.</p> <p>Seharusnya disesuaikan ke Level 2.</p>
			Indikator 94	✓	✓	✓	✓	3	<p>Instansi sudah melakukan pengisian atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi dengan penjelasan/rincian sebagai berikut:</p> <p>1. Telah terdapat Notula kegiatan Konsinyering Penyusunan</p>	<p>Sudah sesuai, Sudah memiliki kebijakan terkait Arsitektur SPBE pada Kepmen No M.HH-14 TI.05.01 Tahun 2023. Namun di dalam kebijakan belum sesuai untuk penerapan atribut metadata Metadata JIP -nya.</p>

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									<p>Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>2. Telah dilampirkan Permenkumham Nomor 30 tahun 2021 tentang SPBE, Permenkumham Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kemenkumham, Kepmenkumham Nomor: M.HH-14.TI.05.01 Tahun 2023 tentang Arsitektur SPBE Kemenkumham, dan Kepmenkumham Nomor: M.HH-15.TI.05.01 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE Kemenkumham Periode 2023-2024.</p> <p>3. Telah disajikan atribut metadata Jaringan Intra Pemerintah yang digunakan objek audit.</p> <p>Dokumen Terpenuhi</p>	
			Indikator 95	✓	✓	✓	✓	2	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pemeliharaan perfektif aplikasi belum diatur dalam Permenkumham Nomor 30 Tahun 2021 tentang SPBE	Belum sesuai, untuk pembahasan dalam bentuk rapat yang membahas terkait pemeliharaan Aplikasi PPP belum dilakukan. Kebijakan terkait pemeliharaan perfektif

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
										belum tercantum dalam Permenkumham No.30 Tahun 2021 Tentang SPBE di Lingkungan Kemenkumham. Bukti penerapan pemeliharaan perfektif sudah termasuk dalam Dokumen Update Patch. Seharusnya dapat naik ke Level 2.
			Indikator 98	✓	✓	x	x	1	1. Data dukung yang dilampirkan terkait penyusunan arsitektur SPBE bukan penyusunan kebijakan yang dipersyaratkan. 2. Kebijakan yang dilampirkan belum menjelaskan terkait pemeliharaan preventif aplikasi. 3. Data dukung belum menjelaskan fitur-fitur atas aplikasi yang menjadi objek audit (aplikasi pendaftaran perseroan perorangan) yang pernah dilakukan bugs fixing/pemeliharaan.	Belum sesuai, untuk pembahasan dalam bentuk rapat yang membahas terkait pemeliharaan Aplikasi PPP belum dilakukan. Kebijakan terkait pemeliharaan Preventif belum tercantum dalam Permenkumham No.30 Tahun 2021 Tentang SPBE di Lingkungan Kemenkumham. Bukti penerapan pemeliharaan korektif sudah termasuk dalam Dokumen Laporan Update Patch. Seharusnya dapat naik ke Level 2.
			Indikator 99	✓	✓	x	x	2	1. Data dukung yang dilampirkan terkait penyusunan arsitektur SPBE bukan penyusunan kebijakan yang dipersyaratkan.	Sudah sesuai, untuk pembahasan dalam bentuk rapat yang membahas terkait pemeliharaan Aplikasi PPP

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									2. Kebijakan yang dilampirkan telah menjelaskan pelaksana pengembangan dan pemeliharaan aplikasi oleh Pusdatin untuk aplikasi umum namun belum menjelaskan pihak yang melaksanakan pemeliharaan aplikasi khusus. 3. telah melampirkan dokumen pemeliharaan aplikasi oleh pihak ketiga dan SK tim kerja di lingkungan Direktorat TI	belum dilakukan. Kebijakan terkait unit kerja pemeliharaan Aplikasi belum tercantum dalam Permenkumham No.30 Tahun 2021 Tentang SPBE di Lingkungan Kemenkumham. Bukti penerapan unit kerja menyelenggarakan fungsi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sudah tercantum pada Kepmen No AHU-1 AH.13 Tahun 2024 tentang Tim Kerja Di Lingkungan Direktorat Teknologi Informasi Tahun 2024, dan unit kerja pemilik proses bisnis terdapat pada Dokumen Laporan Perbaikan.
8	Azizah Farahdiba Wairooy	Auditor Pertama	Indikator 100	✓	✓	x	x	3	1. Sudah terdapat Notula rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi dengan melampirkan notula rapat Pembahasan Revisi SOP Proses Pengembangan Aplikasi, namun belum terdapat Undangan/Notula rapat pembahasan pemeliharaan preventif aplikasi yang secara khusus membahas cara menyimpan backup aplikasi;	Belum sesuai, untuk pembahasan dalam bentuk rapat yang membahas terkait pemeliharaan infrastruktur Pendukung belum dilakukan. Kebijakan Permenkumham No.30 Tahun 2021 belum secara eksplisit membahas terkait backup (penyalinan) data dan aplikasi SPBE. Bukti penerapan Log Book Backup sudah dilampirkan.

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									2. Sudah terdapat Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur backup aplikasi dengan melampirkan Peraturan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang belum diinformalkan tentang Kebijakan Business Continuity Management untuk Layanan Teknologi Informasi; 3. Sudah terdapat catatan form logbook Backup dalam bentuk file word.	Seharusnya disesuaikan ke Level 2.
			Indikator 101	✓	✓	x	x	1	1. Sudah terdapat Notula rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi dengan melampirkan notula rapat Pembahasan Revisi SOP Proses Pengembangan Aplikasi, namun belum terdapat Undangan/Notula rapat pembahasan pemeliharaan preventif aplikasi yang secara khusus membahas cara pelaksanaan pendaftaran Aplikasi SPBE; 2. Belum terdapat Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pendaftaran aplikasi;	Belum sesuai, untuk pembahasan dalam bentuk rapat yang membahas terkait pemeliharaan infrastruktur Pendukung belum dilakukan. Kebijakan Permenkumham No.30 Tahun 2021 belum secara eksplisit membahas terkait Pendaftaran Aplikasi SPBE. Bukti penerapan terlampir pada Kepmen No M.HH-01.TI.06.05 Tahun 2022 Tentang Penetapan Penyelenggaraan Aplikasi Khusus Layanan Publik di Lingkungan Kemenkumham.

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									3. Sudah terdapat dokumen bukti pendaftaran aplikasi yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.TI.06.05 Tahun 2022 tentang Penetapan Penyelenggaraan Aplikasi Khusus Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mana Aplikasi SABH Perseroan Perorangan merupakan salah satu aplikasi yang telah didaftarkan dan ditetapkan melalui SK menteri tersebut. Namun, hanya dapat dikonfirmasi sebagai level 1 karena belum terdapat kebijakan internal.	Seharusnya dapat naik ke Level 2 meskipun Bukti Penerapan sudah ada, namun kebijakan belum menjelaskan secara jelas.
			Indikator 103	✓	✓	x	x	1	1. Sudah terdapat Notula rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi dengan melampirkan notula rapat Pembahasan Revisi SOP Proses Pengembangan Aplikasi, namun belum terdapat Undangan/Notula rapat pembahasan evaluasi aplikasi yang secara khusus membahas unit kerja mana yang harus melaksanakan evaluasi dan	Belum sesuai, sudah dilakukan rapat-rapat yang membahas evaluasi dan pemantauan Aplikasi. Kebijakan Permenkumham No.30 Tahun 2021 belum membahas terkait unit kerja yang melakukan evaluasi dan pemantauan Aplikasi. Bukti penerapan belum tersedia. Seharusnya dapat naik ke Level 2 dengan catatan kebijakan harus membahas

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									pemantauan aplikasi secara berkala; 2. Belum terdapat Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pelaksana evaluasi aplikasi. Data dukung yang dilampirkan adalah SOP pengembangan, bukan SOP evaluasi. 3. Sudah terdapat Permenkumham Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berisikan Tim Koordinasi SPBE Kementerian yang bertugas untuk evaluasi SPBE. Namun, hanya dapat dikonfirmasi sebagai level 1 karena belum terdapat kebijakan internal.	terkait pembangunan dan pengembangan.
			Indikator 104	✓	✓	✓	✓	0	1. Notula rapat Penyusunan Manual IKU Tahun 2024 yang dilampirkan belum memberikan informasi terkait pembahasan penetapan indikator keberhasilan evaluasi aplikasi; 2. Data dukung yang dilampirkan yaitu Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-	Belum sesuai, sudah dilakukan rapat-rapat yang membahas evaluasi dan pemantauan Aplikasi. Kebijakan Permenkumham No.30 Tahun 2021 belum membahas terkait indikator keberhasilan Aplikasi sebagai alat ukur Evaluasi

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									04.TI.05.03 Tahun 2017 tentang Standar Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, belum terdapat penjelasan yang mengatur secara khusus alat ukur evaluasi aplikasi.	Aplikasi. Bukti penerapan belum tersedia. Seharusnya dapat naik ke Level 2 karena sudah ada kebijakan besarnya walaupun belum menjembatani terkait evaluasi aplikasi.
			Indikator 105	✓	✓	x	x	0	1. Data dukung yang dilampirkan yaitu Undangan Rapat Pembahasan detail change request AHU Partai Politik 2024 tidak dapat memberikan informasi apakah terdapat pembahasan terkait tindak lanjut hasil evaluasi aplikasi Pendaftaran Perseroan Perorangan; 2. Data dukung yang dilampirkan yaitu Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 tentang Standar Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, belum terdapat penjelasan yang mengatur secara khusus terkait tindak lanjut hasil evaluasi aplikasi.	Belum sesuai, sudah dilakukan rapat-rapat yang membahas evaluasi dan pemantauan Aplikasi. Kebijakan Permenkumham No.30 Tahun 2021 belum membahas terkait Menindaklanjuti Evaluasi Aplikasi. Bukti penerapan sudah tersedia dalam Penyampaian Hasil Berita Acara Penyusunan Kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2024. Seharusnya dapat naik ke Level 2.
9	Ari Fachryadi	Pranata Komputer Pertama	Indikator 72	✓	✓	✓	✓	2	Instansi belum sepenuhnya melakukan perencanaan dan metodologi uji fungsi aplikasi dengan penjelasan, sebagai berikut:	Notulen rapat tidak membahas terkait pengujian aplikasi; Konten dok. kebijakan terdapat pada

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah terdapat undangan dan notula rapat pada data dukung, namun yang dilampirkan terkait penyusunan arsitektur SPBE bukan yang dipersyaratkan yaitu Kebijakan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE. 2. Sudah terdapat kebijakan pembangunan / pengembangan aplikasi SPBE (M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017), namun di dalam kebijakan tersebut belum memuat/mengatur tentang pelaksanaan uji fungsi aplikasi (BABIII/A/4/a/2). 3. Sudah terdapat gambaran dan penjelasan rencana pengujian berupa BA dan skenario UAT, namun dokumen uji fungsi yang dilampirkan belum menggambarkan secara utuh aplikasi dilakukan uji fungsi secara menyeluruh (pengembangan awal dibuatnya aplikasi). 	Kepmenkumham Nomor: M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 hal 12. Dok. UAT yang diberikan adalah skenario pengujian yang dilakukan pada penambahan fitur aplikasi.
			Indikator 73	✓	✓	X	X	2	Instansi belum sepenuhnya melaksanakan/membuat laporan pengujian uji fungsi aplikasi dengan penjelasan, sebagai berikut:	Konten dok. kebijakan terdapat pada Kepmenkumham Nomor: M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 hal 12.

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									<p>1. Sudah terdapat undangan dan notula rapat pada data dukung, namun yang dilampirkan terkait penyusunan arsitektur SPBE bukan yang dipersyaratkan yaitu Kebijakan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.</p> <p>2. Permenkumham Penyelenggaraan SPBE (Pasal 34) yang dilampirkan, belum secara khusus kebijakan terkait pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE. Kebijakan yang dipersyaratkan harus memuat/mengatur tentang pelaksanaan uji fungsi aplikasi.</p> <p>3. Dokumen laporan uji fungsi yang dilampirkan belum menggambarkan secara utuh aplikasi dilakukan uji fungsi secara menyeluruh (pengembangan awal dibuatnya aplikasi).</p>	Dok. UAT yang diberikan adalah hasil pengujian yang dilakukan pada penambahan fitur aplikasi.
			Indikator 74	✓	✓	X	X	2	Instansi belum sepenuhnya melakukan perencanaan dan metodologi pengujian uji beban aplikasi dengan penjelasan, sebagai berikut:	Dok kebijakan belum memuat uji beban

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									<ul style="list-style-type: none"> 1. Sudah terdapat undangan dan notula rapat pada data dukung, namun data dukung yang dilampirkan terkait penyusunan arsitektur SPBE bukan penyusunan kebijakan yang dipersyaratkan yaitu Kebijakan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE. 2. Permenkumham penyelenggaraan SPBE (Pasal 34) yang dilampirkan, belum secara khusus kebijakan terkait pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE. Kebijakan yang dipersyaratkan harus memuat/mengatur tentang pelaksanaan uji beban aplikasi. 3. Data dukung level 3 tidak ada. 	
			Indikator 75	✓	✓	X	X	2	<p>Instansi belum sepenuhnya melaksanakan/membuat laporan pengujian uji beban aplikasi dengan penjelasan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Sudah terdapat undangan dan notula rapat pada data dukung, namun data dukung yang dilampirkan terkait penyusunan arsitektur SPBE bukan penyusunan kebijakan yang dipersyaratkan yaitu Kebijakan 	Dok kebijakan belum memuat uji beban

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									<p>pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.</p> <p>2. Permenkumham penyelenggaraan SPBE (Pasal 34) yang dilampirkan, belum secara khusus kebijakan terkait pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE. Kebijakan yang dipersyaratkan harus memuat/mengatur tentang pelaksanaan uji beban aplikasi.</p> <p>3. Data dukung level 3 tidak ada.</p>	
			Indikator 76	✓	✓	X	X	2	<p>Instansi belum sepenuhnya melakukan perencanaan dan metodologi pengujian uji Integrasi aplikasi dengan penjelasan, sebagai berikut:</p> <p>1. Sudah terdapat undangan dan notula rapat pada data dukung, namun data dukung yang dilampirkan terkait penyusunan arsitektur SPBE bukan penyusunan kebijakan yang dipersyaratkan yaitu Kebijakan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.</p> <p>2. Kepmenkumham (M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017) yang dilampirkan sudah memuat</p>	<p>Konten dok. kebijakan terdapat pada Kepmenkumham Nomor: M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 hal 12. Dok. metode uji integrasi belum sesuai.</p>

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									tentang pelaksanaan uji integrasi. 3. Data dukung yang dilampirkan belum sesuai perihal uji integrasi yaitu pengujian integrasi dari unit-unit dalam suatu sistem informasi yang sudah teruji dalam unit testing.	
		Indikator 77		✓	✓	X	X	2	Instansi belum sepenuhnya melaksanakan/membuat laporan pengujian uji integrasi aplikasi dengan penjelasan, sebagai berikut: 1. Data dukung yang dilampirkan terkait penyusunan MR SPBE bukan penyusunan kebijakan yang dipersyaratkan yaitu Kebijakan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE. 2. Kepmenkumham (M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017) yang dilampirkan sudah memuat tentang pelaksanaan uji integrasi. 3. Dokumen laporan / data dukung yang dilampirkan belum sesuai perihal uji integrasi yaitu pengujian integrasi dari unit-unit dalam suatu sistem informasi yang sudah teruji dalam unit testing.	Konten dok. kebijakan terdapat pada Kepmenkumham Nomor: M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 hal 12. Dok. hasil uji integrasi belum sesuai.

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
			Indikator 96	✓	✓	X	X	2	<p>Instansi belum sepenuhnya melakukan pemeliharaan adaptif atas aplikasi dengan penjelasan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data dukung yang dilampirkan terkait SOP pengembangan aplikasi bukan penyusunan kebijakan yang dipersyaratkan yaitu Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE atau dapat berupa pembahasan terkait pemeliharaan adaptif aplikasi. 2. Permenkumham yang dilampirkan belum menjelaskan (memuat/mengatur) terkait pemeliharaan adaptif aplikasi. 3. Data dukung level 3 tidak ada. 	<p>Sudah sesuai, untuk pembahasan dalam bentuk rapat yang membahas terkait pemeliharaan Aplikasi PPP belum dilakukan. Kebijakan terkait pemeliharaan adaptif belum tercantum dalam Permenkumham No.30 Tahun 2021 Tentang SPBE di Lingkungan Kemenkumham. Bukti penerapan pemeliharaan adaptif belum tersedia..</p>
			Indikator 97	✓	✓	X	X	2	<p>Instansi belum sepenuhnya melakukan pemeliharaan korektif atas aplikasi dengan penjelasan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data dukung yang dilampirkan terkait penyusunan arsitektur SPBE bukan penyusunan kebijakan yang dipersyaratkan yaitu Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE atau dapat berupa 	<p>Sudah sesuai, untuk pembahasan dalam bentuk rapat yang membahas terkait pemeliharaan Aplikasi PPP belum dilakukan. Kebijakan terkait pemeliharaan korektif belum tercantum dalam Permenkumham No.30 Tahun 2021 Tentang SPBE di Lingkungan Kemenkumham. Bukti penerapan pemeliharaan korektif sudah termasuk dalam</p>

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									<p>pembahasan terkait pemeliharaan korektif aplikasi.</p> <p>2. Kebijakan yang dilampirkan belum menjelaskan (memuat/mengatur) terkait pemeliharaan korektif aplikasi.</p> <p>3. Data dukung yang dilampirkan, belum secara detail menjelaskan fitur-fitur atas aplikasi (objek audit) yang pernah dilakukan bugs fixing/pemeliharaan sebagai bagian dari pelaksanaan pemeliharaan korektif.</p>	Dokumen Laporan Pemeliharaan Aplikasi.
10	Zaidal Bustomi	Pranata Komputer Pertama	Indikator 55	✓	✓	X	X	2	<p>Penggambaran interaksi antar komponen yang ada pada aplikasi dengan antarmuka (interface) sudah tertuang dalam dokumen aplikasi dan navigasi dari layar ke layar sudah sesuai dengan tingkatan pengguna dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1. Sudah terdapat notulen/rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan antar muka internal dan eksternal objek audit;</p> <p>2. Sudah terdapat Arsitektur Proses Bisnis instansi dan</p>	Konten dok, kebijakan terdapat pada Kepmenkumham Nomor: M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 hal 9, Nomor 2. a. 2) f), *Dapat memenuhi level 3

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									Arsitektur Aplikasi instansi, namun belum ada Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur lisensi aplikasi (dapat melampirkan dokumen Kepmenkumham Nomor M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017 tentang Standar Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia); dan 3. Sudah terdapat Dokumen kebutuhan antar muka internal dan eksternal objek audit.	
			Indikator 60	✓	✓	X	X	3	1. Sudah terdapat notulensi rapat; 2. Sudah terdapat Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi, Arsitektur Proses Bisnis instansi, dan Arsitektur Aplikasi instansi; dan 3. Sudah terdapat Dokumen deskripsi rancangan detil teknis basisdata objek audit.	Dok. Kebijakan Kepmenkumham Nomor: M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017, dan Master Dokumentasi Pendirian Aplikasi PPP
			Indikator 61	✓	✓	X	X	3	1. Sudah terdapat notulensi rapat; 2. Sudah terdapat Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan	Terdapat notulen berupa laporan pelaksanaan konsinyasi; Dok. Kebijakan Kepmenkumham Nomor: M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017, dan Master

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									3. Sudah terdapat Dokumen deskripsi rancangan detil teknis basisdata aplikasi yang menggambarkan kepemilikan basis data input dan output objek audit.	Dokumentasi Pendirian Aplikasi PPP
			Indikator 62	✓	✓	X	X	3	1. Sudah terdapat notulensi rapat; 2. Sudah terdapat Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi, Arsitektur Proses Bisnis instansi, dan Arsitektur Aplikasi instansi; dan 3. Sudah terdapat Dokumen yang menggambarkan relasi proses bisnis dan layanan objek audit.	Konten dok. kebijakan terdapat pada Kepmenkumham Nomor: M.HH-14.TI.05.01 tentang Arsitektur SPBE Kemenkumham, namun belum lengkap karena belum menggambarkan relasi dan ID metadata terkait sesuai SE Menpanrb 18 2022; *Memenuhi level 2
			Indikator 63	✓	✓	X	X	3	1. Sudah terdapat notulensi rapat; 2. Sudah terdapat Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi, Arsitektur Proses Bisnis instansi, dan Arsitektur Aplikasi instansi; dan 3. Sudah terdapat Dokumen deskripsi rancangan aplikasi tingkat rendah pada objek audit.	Konten dok. kebijakan perlu dilengkapi lebih lanjut terkait rancangan aplikasi yang bersifat modular. *Memenuhi sampai level 2

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
			Indikator 64	✓	✓	X	X	3	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sudah terdapat notulensi rapat; 2. Sudah terdapat Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi, Arsitektur Proses Bisnis instansi, dan Arsitektur Aplikasi instansi; dan 3. Sudah terdapat Dokumen kebutuhan khusus terkait arsitektur layanan microservices pada objek audit yang menggambarkan integrasi dengan beberapa aplikasi (PT, DUKCAPIL, dan DJP) namun belum spesifik pada teknis pengintegrasian, sebaiknya dokumen tersebut juga dilampirkan. 	Konten dok. kebijakan perlu dilengkapi lebih lanjut terkait anungan aplikasi yang bersifat microservices. *Memenuhi sampai level 2
			Indikator 102	✓	✓	X	X	3	<ul style="list-style-type: none"> 1. Belum terdapat notulensi rapat yang secara spesifik membahas mengenai penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau pemeliharaan preventif aplikasi; 2. Sudah terdapat Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur repositori aplikasi; dan 	Belum sesuai, untuk pembahasan dalam bentuk rapat yang membahas terkait pemeliharaan infrastruktur Pendukung belum dilakukan. Kebijakan Permenkumham No.30 Tahun 2021 belum secara eksplisit membahas terkait Repository Aplikasi. Bukti penerapan terlampir pada screenshot repository pada Gitlab AHU-PP-DEV

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pembagian Tugas	Tahap I		Tahap II		Posisi Konfirmasi s.d. saat ini		Catatan/Hasil Koreksi dari Pihak BRIN (2 Mei 2024)
				Jawab (3-5 April)	Konfir masi (6 April)	Jawab (16-22 April)	Konfir masi (23-24 April)	Level (1, 2, 3)	Catatan Konfirmasi	
									3. Sudah terdapat Dokumen bukti pemeliharaan kode sumber / repositori penyimpanan kode sumber, yaitu bukti repositori GIT aplikasi Perseroan Perorangan.	

DOKUMENTASI
TANGGAL 02 MEI 2024

